



**BADAN PENDAPATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR**

# LAKIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

# 2021



**BADAN PENDAPATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

# KATA PENGANTAR



Laporan kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2021 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran Kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jbaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan dan kebijakan yang ditetapkan capaian kinerja organisasi yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.

Akhirnya semoga hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan ini dapat bermanfaat, masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan.

Polewali, 17 Februari 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**Ir. BUDIUTOMO ABDULLAH, MM**  
Pangka : Pembina Utama Muda  
NIP : 19660520 199203 1 017

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis, sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan Pendapatan Tahun 2019-2024. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar yang dihasilkan di tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan indikator Persentase Capaian Pajak Daerah, capaian kinerja sampai pada akhir Desember 2021 adalah 97.10 %
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah dengan indikator Persentase Capaian Target Retribusi Daerah, capaian kinerja sampai pada akhir Desember 2021 adalah 118.95%
- c. Sasaran 3 : Meningkatnya tertib Administrasi Pendapatan Daerah dengan indikator Persentase Tertib Administrasi Pembukuan Pajak dan Retribusi Daerah, capaian kinerja sampai akhir Desember 2021 adalah 100 % dan Jumlah Paket Dokumen data Potensi Pendapatan Daerah adalah 13 Paket

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar ke depan. Pertama, pengintegrasian sistem yang digunakan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dan kedua penyiapan regulasi penggunaan asset yang disewakan terhadap pihak ketiga.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan Bagi Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang



# DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 STRUKTUR ORGANISASI.....	2
1.2 TUGAS DAN FUNGSI .....	4
1.3 KEADAAN PEGAWAI .....	5
1.4 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA.....	7
1.5 ISU STRATEGIS ORGANISASI.....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>11</b>
2.1 RENCANA STRATEGIS .....	11
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 .....	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN .....</b>	<b>18</b>
3.1 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN SASARAN STRATEGIS .....	21
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA LAINNYA .....	57
3.3 REALISASI ANGGARAN .....	57
3.4 ANALISIS EFISIENSI .....	59
<b>BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN .....</b>	<b>61</b>
4.1 KESIMPULAN.....	61
4.2 SARAN .....	62

## Daftar Tabel

Tabel 1.1 Kondisi rill pegawai berdasarkan golongan tingkat pendidikan, dan jenis kelamin .....	5
Tabel 1.2 Kondisi rill pegawai berdasarkan jabatan .....	6
Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan .....	7
Tabel 2.1 Sasaran strategis Badan Pendapatan .....	14
Tabel 2.2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2021 .....	15
Tabel 2.3 Target belanja Badan Pendapatan tahun 2021 .....	16
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	18
Tabel 3.2 Capaian Kinerja tahun 2021 .....	19
Tabel 3.3 Realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2021 .....	29
Tabel 3.4 Tren Peningkatan Pajak Daerah tahun 2018-2021 .....	30
Tabel 3.5 Data Kegiatan Pendukung pada Indikator 1 .....	45
Tabel 3.6 Kinerja Input pada Indikator 1 .....	46
Tabel 3.7 Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah Tahun 2021 .....	48
Tabel 3.8 Peningkatan Retribusi Daerah Tahun 2021 .....	50
Tabel 3.9 Dokumen Data Potensi Pendapatan Daerah .....	54
Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021 .....	57
Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran Tahun 2021.....	58
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Tahun 2021 .....	59

## Daftar Grafik

<b>Gambar 3.1 Tren Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2018-2021 .....</b>	<b>24</b>
<b>Gambar 3.2 Tren Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2018-2021.....</b>	<b>25</b>
<b>Gambar 3.3 Tren Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2018-2021 .....</b>	<b>27</b>
<b>Gambar 3.4 Tren Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2018-2021.....</b>	<b>29</b>
<b>Gambar 3.5 Tren Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2018-2021.....</b>	<b>31</b>
<b>Gambar 3.6 Tren Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2018-2021 .....</b>	<b>33</b>
<b>Gambar 3.7 Tren Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2018-2021.....</b>	<b>35</b>
<b>Gambar 3.8 Tren Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2018-2021 .....</b>	<b>36</b>
<b>Gambar 3.9 Tren Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2018-2021 .....</b>	<b>37</b>
<b>Gambar 3.10 Tren Penerimaan Pajak BPHTB Tahun 2018-2021.....</b>	<b>39</b>
<b>Gambar 3.11 Tren Penerimaan Pajak PBB P2 Tahun 2018-2021 .....</b>	<b>41</b>
<b>Gambar 3.12 Tren Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2018-2021 .....</b>	<b>42</b>
<b>Gambar 3.13 Grafik Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2021.....</b>	<b>49</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

TAHUN



## BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 868 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, maka setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Wajib Menyusun laporan Kinerja Perangkat Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 diharapkan dapat;

Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.

Mendorong Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar untuk meningkatkan kinerjanya.

Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar di dalam pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bentuk pencapaian kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun waktu 1 tahun yang akan dievaluasi pada setiap triwulan untuk melihat capaian kinerja perangkat daerah..

## 1.1. Struktur Organisasi

Organisasi Pemerintah Daerah Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Organisasi Pemerintah Daerah Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar merupakan unsur penunjang pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar. Untuk meningkatkan kinerja pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan rekomendasi dari Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka kelembagaan Badan Pendapatan dilakukan penataan ulang yang diatur dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan dengan susunan organisasi Badan terdiri dari:

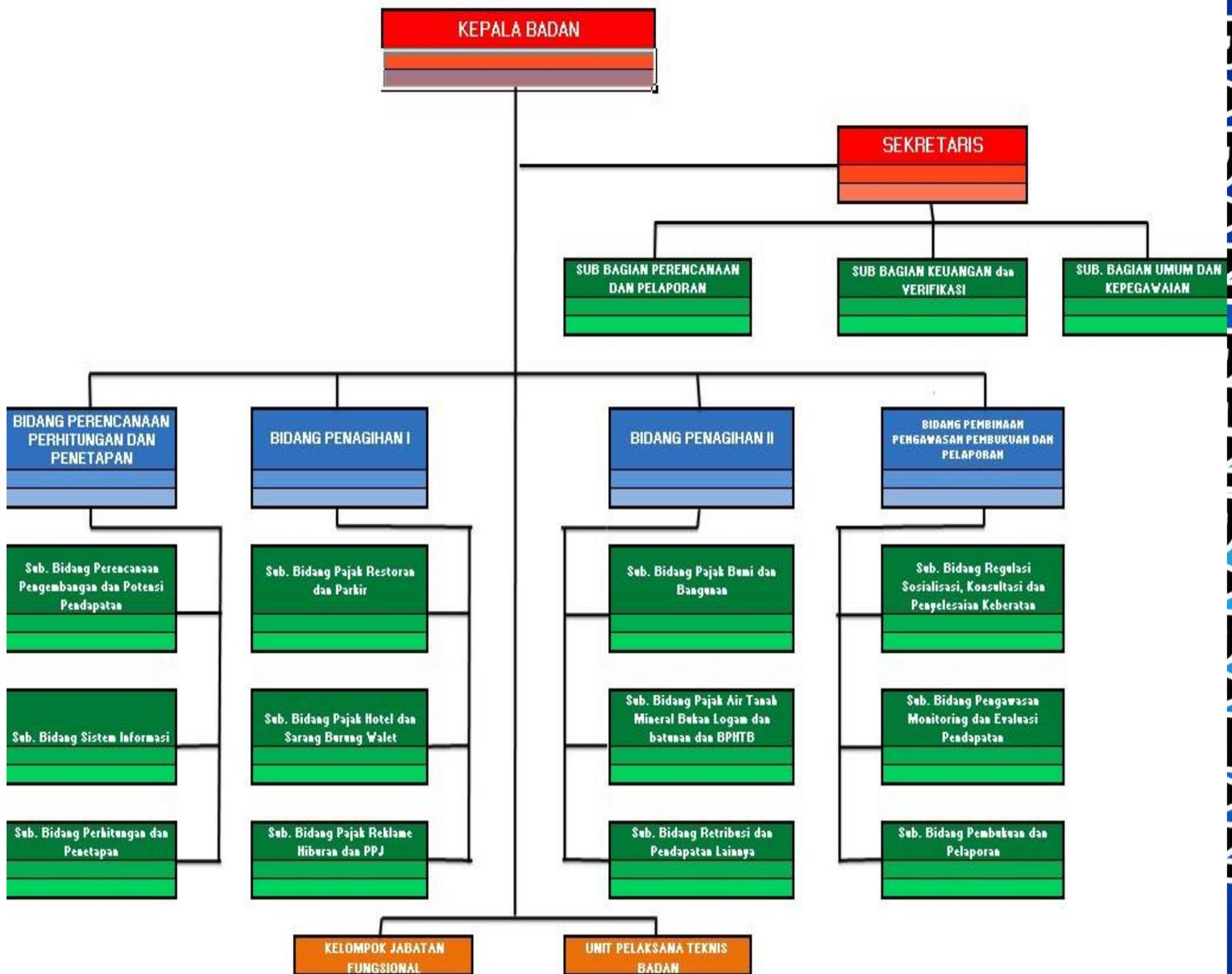
1. Kepala;
2. Sekretariat :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan
  - b. Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan
  - c. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan
4. Bidang Pajak Penagihan I terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pajak Restoran dan Parkir;
  - b. Sub Bidang Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet;
  - c. Sub Bidang Pajak Reklame, Hiburan dan Penerangan Jalan.
5. Bidang Pajak Penagihan II terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
  - b. Sub Bidang Air Tanah, Mineral Bukan Logam dan Batuan dan BPHTB;
  - c. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya.
6. Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Regulasi, Sosialisasi, Konsultasi dan Penyelesaian

Keberatan;

- b. Sub Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan;
- c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

7. Unit Pelaksanaan Teknis Badan

8. Kelompok Jabatan Fungsional



## 1.2. Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 2 Juli 2020 menetapkan bahwa Badan Pendapatan mempunyai fungsi penunjang pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan, teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi di bidang pendapatan; dan
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi di bidang pendapatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



### 1.3. Keadaan Pegawai

Pegawai Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar per 31 desember 2021 sebanyak 38 orang, perincian kondisi riil pegawai berdasarkan jabatan, golongan tingkat pendidikan, jenis kelamin adalah sebagaimana tabel 1.1 dibawah..

**Tabel 1.1. Kondisi Riil pegawai berdasarkan golongan tingkat pendidikan, dan Jenis Kelamin**

GOL	LAKI-LAKI							JML	PEREMPUAN							JML	JML TOTAL
	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD		S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD		
IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/c	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
IV/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
IV/a	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	3
<b>Jml Gol IV</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
III/d	2	4	0	0	0	0	0	6	1	5	0	0	0	0	0	6	12
III/c	1	2	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	2	5
III/b	0	7	0	0	0	0	0	7	0	2	0	1	0	0	0	3	10
III/a	0	2	0	0	1	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	2	5
<b>Jml Gol III</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>32</b>
II/d	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2
II/c	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2
II/b	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
II/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jml Gol II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
<b>Jml Total</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>38</b>

Sumber: Kepegawaian Badan Pendapatan 2021

Dari data kepegawaian berdasarkan tingkat Pendidikan pegawai Badan Pendapatan dapat dilihat bahwa tingkat Pendidikan S1 lebih banyak dari pada Pendidikan S2 yakni berjumlah 26 orang untuk tingkat Pendidikan S1 namun terdapat beberapa Pegawai yang masih berpendidikan tingkat SLTA yang berjumlah 6 orang dari total pegawai yang berjumlah 43 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pendapatan dalam hal sumber daya manusia, rata-rata pegawai Badan Pendapatan sudah memenuhi kriteria sumber daya manusia dalam pelaksanaan organisasi namun masih tambahan jumlah pegawai dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

Tabel 1.2. Kondisi Riil Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan		Eselon	Kondisi Riil	Formasi
1	Struktural	Kepala Badan	II.A	1	1
		Sekretaris	III.A	1	1
		Kepala Bidang	III.B	4	4
2	Jabatan Pelaksana	Kepala Seksi	IV.A	15	15
		Staf	-	21	43
		<b>Jumlah</b>		43	64

Sumber: *Kepegawaian Badan Pendapatan 2021*

Jabatan struktural Badan Pendapatan yang terisi pada sebanyak 17 orang sedangkan jumlah ideal sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 21 orang, jabatan fungsional umum staf sebanyak 21 orang, sedangkan kebutuhan ideal formasi sebanyak 43 Orang. Hal ini menunjukkan Badan Pendapatan masih kekurangan membutuhkan 23 jabatan fungsional umum yang bertugas dalam urusan penagihan dan pengawasan pajak daerah.

Untuk pejabat struktural pada jabatan struktural pada tanggal 6 Januari 2020 telah dilakukan pelantikan Jabatan Struktural lingkup Pemerintahan yang mengisi jabatan struktural eselon II, III dan IV pada Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah sehingga beberapa Jabatan Eselon mengalami pergeseran Jabatan menyesuaikan dengan Nokmenklatur Kelembagaan Baru pada Badan Pendapatan sudah terisi dengan jajaran pejabatan diantara 1 orang pejabatan eselon III dan 3 orang pejabatan eselon IV dan ada beberapa pejabatan structural yang mengalami perubahan tempat tugas yaitu 3 orang pejabatan eselon III dan 4 orang pejabatan eselon IV. Kabupaten Polewali Mandar untuk penambahan jumlah pegawai pada Badan Pendapatan dalam upaya peningkatan kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.

#### 1.4. Keadaan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai sangat menentukan efektifitas kinerja organisasi. Adapun ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

**Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan**

No	Sarana / Prasarana	Jumlah	
		Kondisi Riil	Kebutuhan Ideal
1	2	3	4
1	Bangunan / Gedung / ruangan	19	22
2	Kendaraan Roda 4	2	3
3	Kendaraan Roda 2	18	26
4	Komputer PC	16	18
5	Laptop	12	21
6	Air Condition (AC)	20	20
7	Server	2	2
8	UPS	5	5
9	Printer	19	19
10	CCTV	5	5
11	LCD Viuwer	2	2
12	Mesin Ketik	-	-
13	Mesin Ketik Listrik	1	1
14	Brankas	1	2
15	Telepon / Fax	1	1
16	Lemari Arsip	61	61
17	Lemari Buku	8	8
18	Meja Kantor	77	77
19	Meja Rapat	10	10
20	Meja Pelayanan	1	1
21	Meja Komputer	13	13
22	Kursi Kerja	60	60
23	Kursi Putar	43	41
24	Kursi Plastik	15	15
25	Kursi Ruang Pelayanan	2	2
26	Kursi Tamu (Sofa)	6	6
27	Kursi Rapat	62	62
28	Dispenser	8	10
29	Televisi	4	10
30	Alat porforasi	4	5
31	Kulkas	2	2
32	Stavolt	3	3
33	Kalkulator	11	11

34	Conter Pelayanan	1	1
35	Conter Informasi	1	1
36	Rak Server	1	1
37	Wirless	1	1
38	Stand Kaki Kamera	2	2
39	Mesin Pompa Air	2	2
40	Sarana Cek Point	4	4
41	Papan Informasi	1	1
42	Papan Billoard	23	23
43	Mesin Kas Register	13	13
44	Mesin Perforasi Elektrik	1	1

Sumber data : Daftar Inventaris Badan Pendapatan 2021

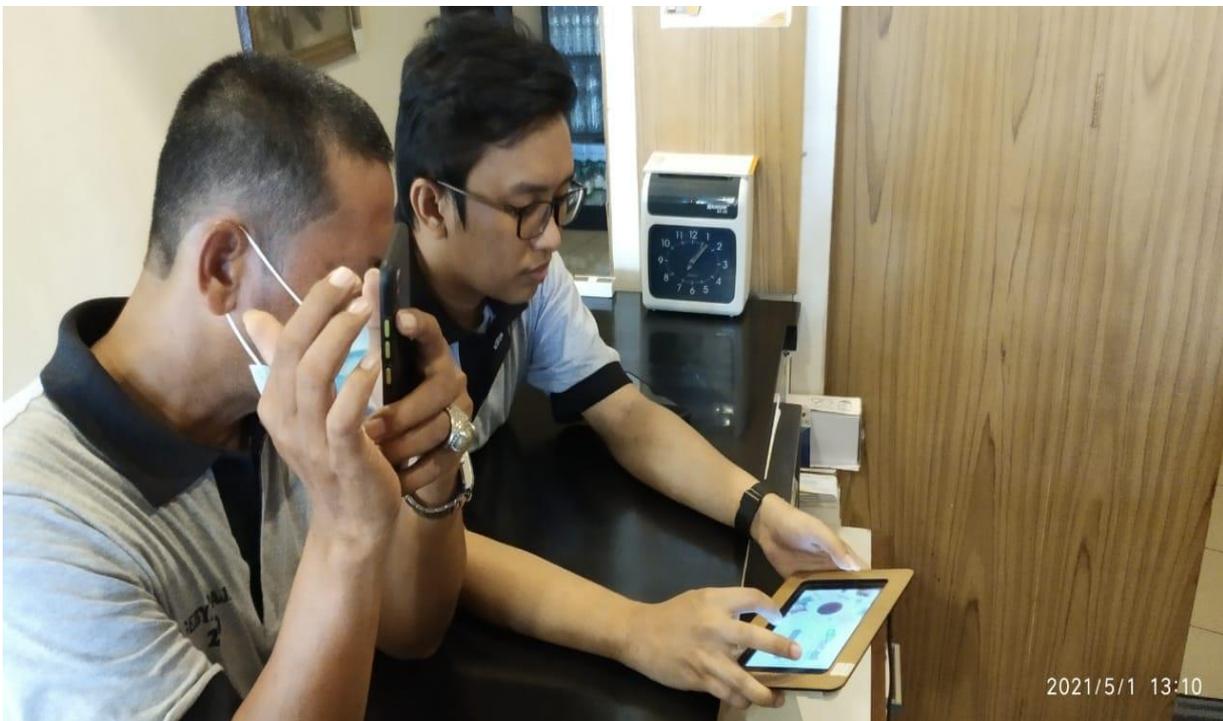
Berdasarkan tabel 1.4. di atas dapat dijelaskan bahwa kebutuhan ideal sarana prasarana mendukung kelancaran tugas Badan Pendapatan telah memenuhi kebutuhan sesuai beban kerja, ada beberapa sarana yang belum sesuai dengan kebutuhan ideal seperti Kendaraan roda 4 yang tersedia hanya 2 unit sedangkan kebutuhan untuk operasional Badan Pendapatan sebanyak 3 unit, Kendaraan roda 2 sedangkan kebutuhan untuk operasional dinas mencapai 26 unit, Komputer PC yang berjumlah 16 unit sedangkan kebutuhan kantor sebanyak 18 unit, Printer yang berjumlah 16 unit sedangkan untuk kebutuhan kantor sebanyak 18 unit dan ruangan kerja masih perlu tambahan unit untuk meningkatkan kinerja Badan Pendapatan dalam melayani masyarakat.



## 1.5. Isu Strategis Organisasi

Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar. Menetapkan beberapa isu strategis yang perlu ditangani dalam rencana strategis Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, yaitu :

1. Layanan pembayaran pajak daerah mobile kerjasama dengan bank dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak untuk masyarakat
2. Pengelolaan pajak daerah berbasis online system dan mekanisme pembayaran yang berbasis online.
3. Sosialisasi tentang pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat
4. Sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang berbasis online system
5. Kekurangan staf petugas pajak dan retribusi daerah yang bertugas dalam penyampaian ketetapan pajak daerah.
6. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR



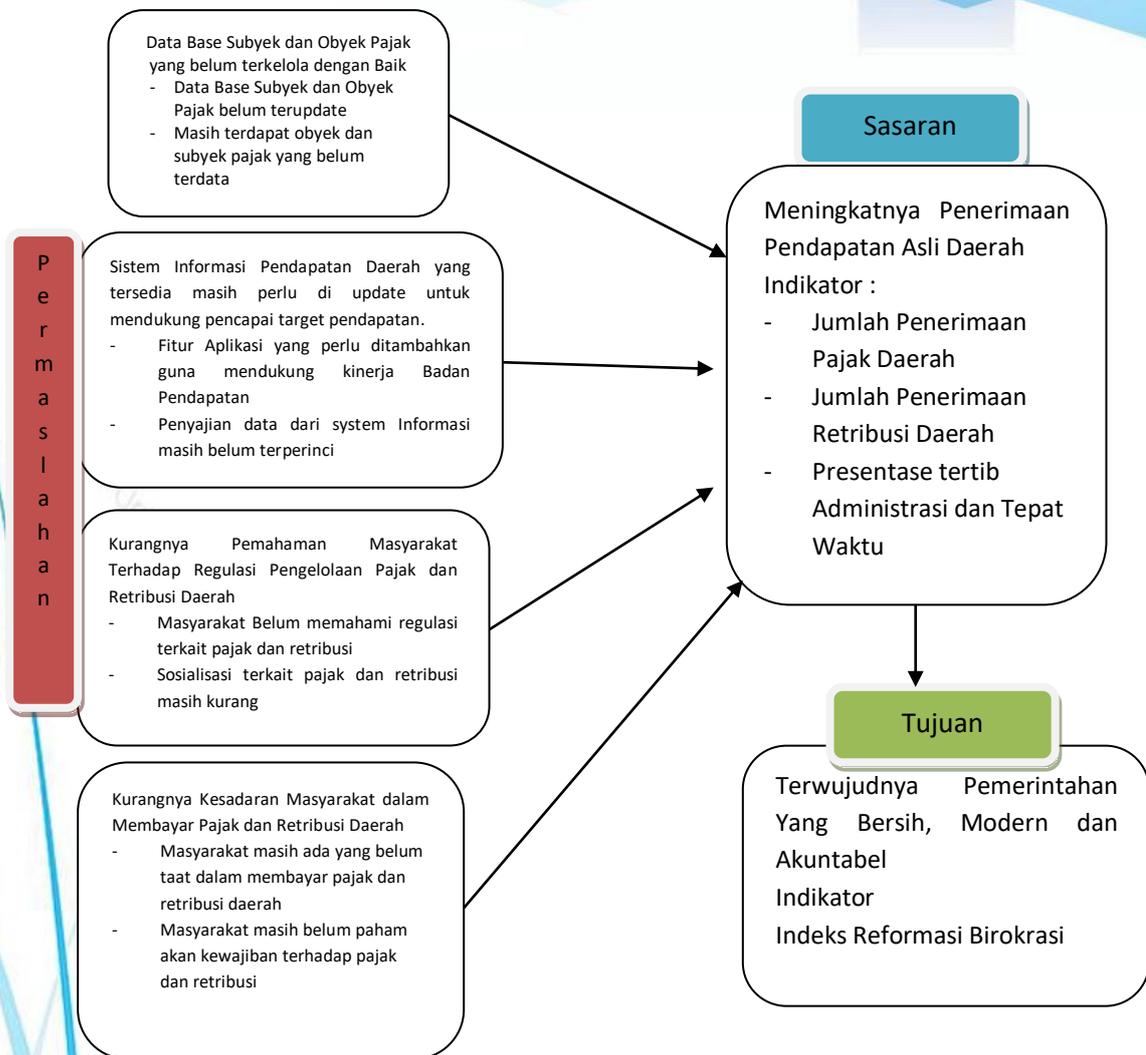
## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi untuk mencapai visi dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun Renstra Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun), yang menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Badan Pendapatan merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan dalam mencapai sasaran strategis Tahun 2021 yang tergambar pada realisasi penetapan kinerja yang mengacu pada Renstra Badan Pendapatan tahun 2019-2024. Adapun visi, misi dan tujuan organisasi yang juga tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan tahun 2019-2024 merupakan panduan/acuan Badan Pendapatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Tahun 2019-2024, dirumuskan sebagai berikut :



Gambar 2.1

Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pendapatan Tahun 2019 – 2024

Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran. Penentuan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria **SMART-C** yaitu : *specific* (jelas), *measureable* (dapat diukur), *agreeable* (dapat disetujui), *realistic* (dapat dicapai), *time bounded* (memiliki batas waktu pencapaian) dan *continuously improved* (perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja tujuan dan sasaran merupakan indikator di level *outcome* (hasil). Indikator Sasaran Strategis dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Di samping IKU dimaksud, disusun pula indikator sasaran strategis penunjang pencapaian IKU.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah 5 tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Rencana Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024 adalah:

1. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli

Sasaran: Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Indikator:

- a. Jumlah Penerimaan Pajak Daerah
- b. Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah
- c. Persentase Administrasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu

2. Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran

Sasaran : Meningkatnya Manajemen Perkantoran

Indikator :

- Indeks Kepuasan Masyarakat

3. Meningkatnya Kinerja Satuan Kerja

Sasaran : Meningkatnya Kinerja Satuan Kerja

Indikator :

- Predikat SAKIP Perangkat Daerah

4. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator :

- Opini Pengelolaan Keuangan

Adapun penjabaran atas Tujuan dan Sasaran Strategi Badan Pendapatan Tahun 2019 – 2024 sebagaimana yang tertuang pada Rencana Strategi Badan Pendapatan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel Berikut ini

**Tabel 2.1. Sasaran Strategis Badan Pendapatan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	5	6	7	8
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	18 M	22 M	26 M	25 M	28 M
			Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	10 M	11 M	12 M	13 M	14 M
			Persentase Pengelolaan Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah yang tertib, sesuai standar dan tepat waktu	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
3	Meningkatnya Kinerja Satuan Kerja	Meningkatnya Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A
4	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Renstra Badan Pendapatan 2019-2024

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran tahun 2021, sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 2.2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,252,600
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18,996,700
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,382,689,805
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13,401,000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Perengkapannya	19,560,000
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,109,000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17,210,000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	187,280,800
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	1,320,000
			Penyediaan Material	48,856,400
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119,460,200
				11,685,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	60,103,200	

		Pemerintah Daerah	Bangunan Lainnya	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26,395,000
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3,600,000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26,064,000
		Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kendaraan Dinas/Operasional	99,393,400
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Berkala Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	13,400,000
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	257,774,300
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	259,460,500
			Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	96,099,800
			Penagihan Pajak Daerah	341,477,200
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	427,768,600
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	632,332,300
		<b>J U M L A H</b>		<b>8,077,689,805</b>

Sumber: Badan Pendapatan, 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan kegiatan dengan anggaran Rp. 8.077.689.805 dengan rincian belanja tidak langsung Rp. 5.382.689.805 dan belanja langsung Rp. 2.695.000.000 pada tanggal 19 Oktober 2021.

**Tabel. 2.3. Target Belanja Badan Pendapatan Tahun 2021**

Uraian	Target	Persentase
1	2	3
Belanja Tidak Langsung	5.382.689.805	66.63 %
Belanja Langsung	2.695.000.000	33.36 %
Jumlah	8.077.689.805	100 %

Sumber: Badan Pendapatan, 2021

Dari tabel 2.3. di jelaskan proporsi pembagian anggaran Badan Pendapatan Tahun 2021 yang lebih besar pada Pos Anggaran Belanja tidak

langsung yang mencapai 66.63 % sedangkan untuk belanja langsung sebesar 33.36 % untuk membiayai kegiatan operasional perkantoran dan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah



# BADAN PENDAPATAN

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

### A. Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 yang disepakati oleh Tim Pengelola Kinerja. Penilaian kinerja dimaksud dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sehingga akan menjadi input untuk perencanaan tahun-tahun selanjutnya.

Hasil pengumpulan data selanjutnya akan dilakukan kategori kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dengan menggunakan instrument pengukuran sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 yaitu:

**Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

*Berdasarkan Permedagri Nomor 54 Tahun 2010*

Pengukuran target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Renstra Badan Pendapatan 2019 – 2024. dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja pada tahun berkenaan. Pada bagian ini diungkapkan analisis keberhasilan, atau kegagalan, pencapaian target, Kendala yang dihadapi analisis efisiensi sumber daya yang dilakukan serta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

**Tabel. 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Presentase	Kriteria / Kode
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase capaian target pajak daerah	%	100	97	Sangat Baik
		Persentase capaian target retribusi daerah	%	100	118	Sangat Baik
		Persentase Pengelolaan Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah yang tertib, sesuai standar dan tepat waktu	%	100	100	Sangat Baik
2	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	%	100	100	Sangat Baik
3	Meningkatannya Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	Sangat Baik

4	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	Sangat Baik
---	------------------------------------------	-----------------------------------	-----	-----	-----	-------------

Sumber: Badan Pendapatan, 2020

Dari hasil evaluasi sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 di atas, dari 6 indikator yang terbagi ke dalam 4 sasaran strategis sebanyak 4 indikator telah memenuhi target yang ditetapkan **Sangat Baik** atau 100 % dari total indikator, Capaian tertinggi pada indikator Persentase Target Pajak Daerah dengan capaian kinerja sasaran sebesar 97 %, kemudian sasaran meningkatnya penerimaan retribusi daerah sebesar 118 %. Namun untuk sasaran Meningkatnya Penerimaan Tertib Administrasi Pendapatan dengan Pengelolaan Administrasi Pajak dan Retribusi yang tertib dan tepat waktu yang mencapai 100% sedangkan Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran, kinerja perangkat daerah dan pengelolaan keuangan perangkat daerah dengan kreteria **Sangat Baik**.



### 3.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Strategis

Bagian ini akan mengevaluasi secara mendalam berdasarkan sasaran-sasaran strategis Badan Pendapatan tahun 2021 dengan capaian indikator masing-masing sebagai berikut:

#### 3.1.1 Indikator Presentase Penerimaan Pajak Daerah

Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya penerimaan pajak daerah terdiri dari satu indikator yaitu persentase capaian target Pajak Daerah. Capaian Pajak Daerah dihitung dengan formulasi Realisasi Pajak Daerah dibagi dengan Target Pajak Daerah kemudian dikalikan 100, dengan formulasi dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Terdapat 11 Jenis pajak daerah yang dipungut antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak BPHTB, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

Dari hasil rekonsiliasi penerimaan akhir tahun, Terdapat 6 jenis Pajak yang mencapai dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Sedangkan Jenis pajak yang belum mencapai target ada 5 jenis, yaitu Pajak BPHTB, PBB P2, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Hiburan dan Pajak Sarang Burung Walet.

Dengan menggunakan formulasi di atas, capaian Sasaran Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dapat terlihat pada Tabel 3.3 berikut:

**Tabel 3.3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021**

No	Uraian	Target	Realisasi *)	Capaian Kinerja (%)
1	Pajak Hotel	650.000.000,00	732.122.797,00	113
2	Pajak Restoran	2.100.000.000,00	2.633.510.631,00	125
3	Pajak Sarang Burung Walet	350.000.000,00	157.478.000,00	45,31
4	Pajak Air Tanah	36.000.000,00	36.525.600,00	101
5	Pajak BPHTB	4.100.000.000,00	3.779.295.563,00	92
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.150.000.000,00	907.965.969,00	42
7	Pajak Reklame	460.000.000,00	506.719.850,00	110
8	Pajak Penerangan Jalan	11.237.586.090,00	11.746.675.347,00	104
9	Pajak Bumi dan Bangunan	5.200.000.000,00	4.724.394.084,00	91
10	Pajak Hiburan	110.000.000,00	35.253.500,00	32
11	Pajak Parkir	20.000.000,00	18.013.404,00	90
	<b>J U M L A H</b>	<b>26.413.586.090</b>	<b>25.277.963.744,00</b>	<b>96</b>

Sumber: Badan Pendapatan, 2021

Dari table 3.3 di atas terlihat realisasi capaian pada sasaran kinerja Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah adalah sebesar **96 %** yaitu dengan realisasi **Rp. 26.413.586.090** dari target **Rp. 25.277.963.744,00** sehingga capaian kinerja pada indikator ini masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK**.

Masih terdapat 4 jenis pajak yang belum mencapai 100% yang namun apabila kita membandingkan tren pendapatan pajak daerah tahun 2018 sampai dengan 2021, maka terdapat peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah dengan angka yang cukup menggembirakan yaitu dengan peningkatan sebesar 0,22%. Peningkatan realisasi terbesar dicapai pada jenis pajak hiburan 1.16 % dan pajak air tanah sebesar 0.90%. sebagaimana pada tabel 3.4. berikut ini:

**Tabel 3.4. Tren Peningkatan Pajak Daerah Tahun 2018 - 2020**

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	%
	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>21,447,227,550.00</b>	<b>24,370,100,225.58</b>	<b>24,371,755,192.46</b>	<b>25,277,963,744.56</b>	(0.22)
1	Pajak Hotel	372,036,106.00	540,578,760.30	516,395,068.00	732,122,797.00	(0.15)
2	Pajak Restoran	1,203,054,444.00	2,124,903,427.00	1,660,849,677.00	2,633,510,631.00	(0.11)
3	Pajak Hiburan	53,406,875.00	104,006,564.00	67,769,234.00	35,253,500.00	(0.10)
4	Pajak Reklame	414,550,500.00	420,505,750.00	504,924,875.00	506,719,850.00	(0.20)
5	Pajak Penerangan Jalan	10,382,309,471.00	11,146,111,452.00	11,234,165,080.00	11,746,684,347.00	(0.23)
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	564,151,597.00	2,108,813,509.28	918,663,923.46	907,965,969.00	0.29
7	Pajak Air Tanah	26,605,000.00	30,647,200.00	36,864,200.00	36,525,600.00	(0.16)
8	Pajak Sarang Burung Walet	71,190,000.00	81,965,000.00	141,154,500.00	157,478,000.00	(0.03)
9	Pajak Bumi dan Bangunan	4,103,858,827.00	4,297,035,213.00	4,954,768,247.00	4,724,394,083.56	(0.20)
10	Pajak BPHTB	4,237,774,730.00	3,495,793,350.00	4,310,973,088.00	3,779,295,563.00	(0.24)
11	Pajak Parkir	18,290,000.00	19,740,000.00	25,227,300.00	18,013,404.00	(0.16)

Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2021

Dari tabel 3.4. diatas dapat dilihat bahwa dari 11 jenis pajak yang dikelola Badan Pendapatan tahun 2018 s/d 2021 terjadi peningkatan per jenis pajak daerah sebagaimana digambarkan pada grafik berikut ini :



Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2021

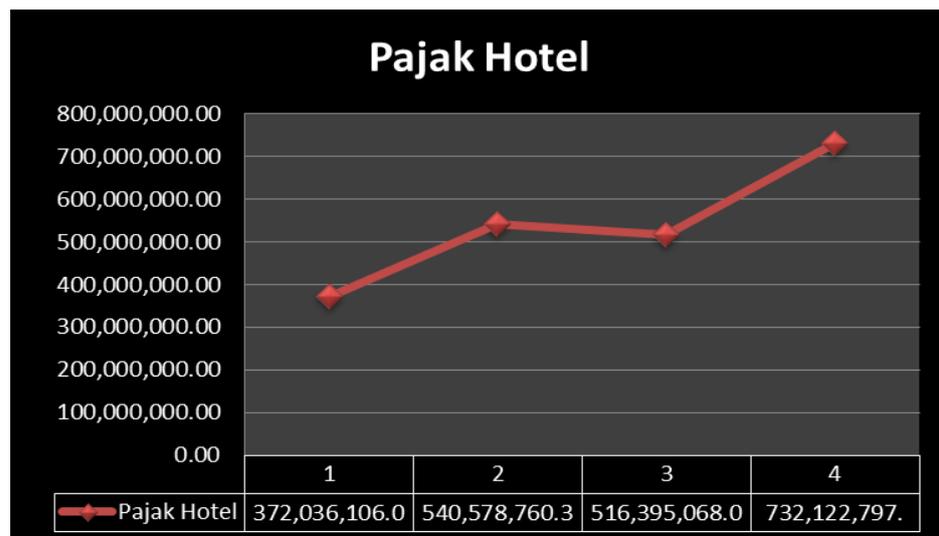


Tren peningkatan perjenis pajak daerah tahun 2018 sampai dengan 2021 dapat dilihat peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Polewali Mandar dari uraian berikut ini sehingga dapat dilihat peningkatan target dan realisasi pajak daerah sebagai berikut ini :

**1. Pajak Hotel**

Penerimaan Pajak Hotel yang dikelola oleh Badan Pendapatan pada tahun 2021 dari target **Rp. 650.000.000** dan realisasi sebesar **Rp. 732.122.797** atau **113 %** sehingga dapat terlihat tren penerimaan pendapatan pajak hotel mengalami fluktuatif pada tahun 2018-2021 sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini :

**Gambar 2 : Tren Penerimaan Pajak Hotel 2018-2021**



Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2021

Dari grafik perkembangan penerimaan pajak hotel diatas terjadi peningkatan penerimaan pajak hotel terjadi pada tahun 2018 sampai 2021 kenaikan penerimaan pajak hotel. Adapun hal-hal yang menyebabkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Polewali Mandar karena hal-hal sebagai berikut ini :

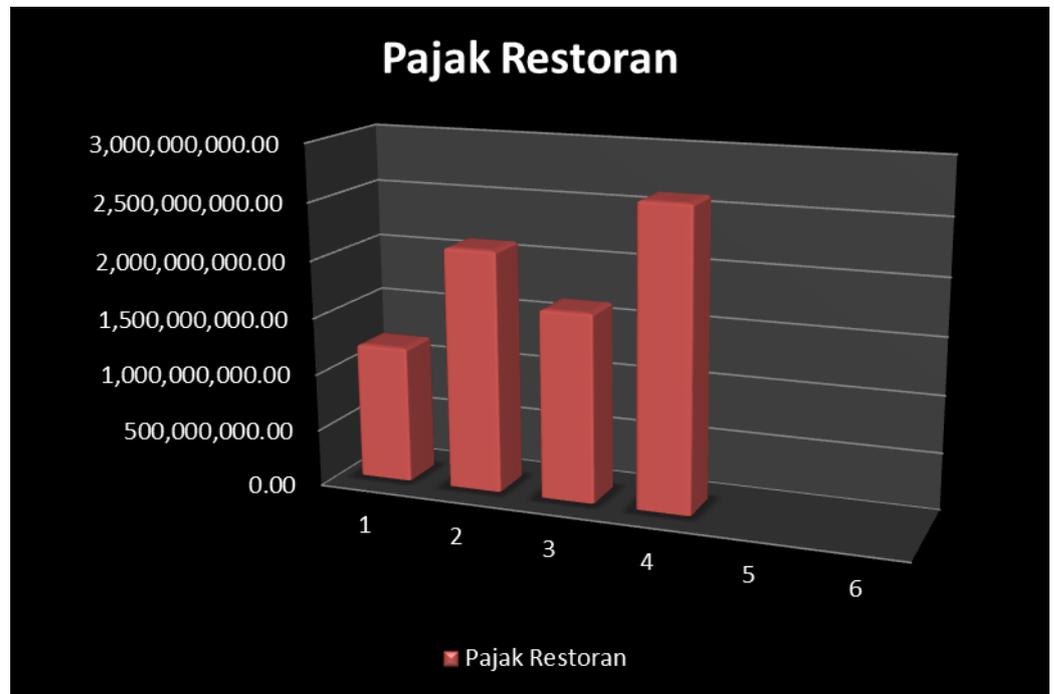
- a. Tingkat kunjungan hotel dan penginapan di Kabupaten Polewali Mandar yang mengalami peningkatan menyebabkan meningkatnya penerimaan dari pajak hotel di Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Kerjasama Integrasi yang di Bangun antara Bank Sulselbar dan Badan Pendapatan atas Rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak hotel Kabupaten Polewali Mandar.
- c. Pemantauan penerimaan realisasi pajak hotel oleh Badan Pendapatan, Bank Sulsebar dan KPK dengan dipasangnya alat perekam pajak yang di sebut dengan Tapping Box yang menggunakan aplikasi MPOS berbasis online menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pungut terhadap penyetoran pajak hotel yang sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan oleh wajib pungut



2. Pajak Restoran

Penerimaan pajak restoran yang dikelola oleh Badan Pendapatan tahun 2019 dari target sebesar **Rp. 1.170.000.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 2.124.903.427** atau sebesar **182 %** dipengaruhi oleh penerimaan dari restoran / rumah makan dan anggaran belanja makan dan minum pegawai negeri pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kabupaten Polewali Mandar. Untuk melihat tren penerimaan pajak restoran pada tahun 2016 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 3 : Tren Penerimaan Pajak Restoran 2018-2021



Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2021

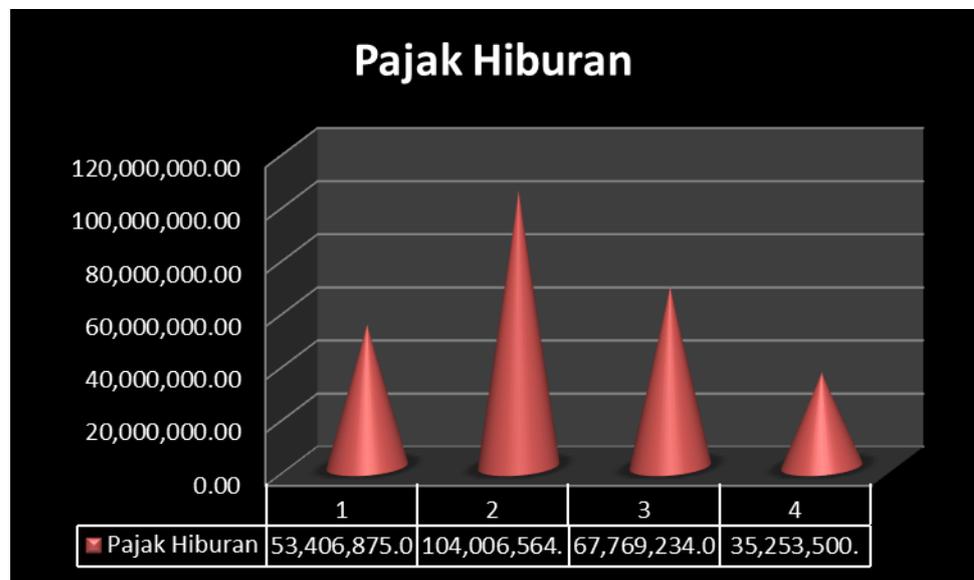
Penerimaan pajak restoran mencapai target yang telah ditetapkan sebesar **112,43 %** pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan sebesar **182 %** namun jika penerimaan pajak restoran dilihat dari penerimaan rumah makan dan belanja makan dan minum pegawai, maka dapat diketahui bahwa penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun ini. Adapun hal-hal yang menyebabkan meningkatnya penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Penambahan jumlah wajib pajak restoran yang berada di Kabupaten Polewali Mandar serta meningkatnya masyarakat yang lebih memilih alternatif makan di rumah makan / restoran dari pada di rumah mereka.
- b. Alat perekam Pajak yang disebut Tapping box dengan aplikasi MPOS berbasis online yang sudah di pasang di beberapa titik restoran / rumah makan yang dianggap punya potensi penerimaan yang besar sehingga realisasi penerimaan pajak terjadi sangat signifikan pada tahun 2019.
- c. Koordinasi antara Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dengan Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar terkait penerimaan pajak restoran dan pajak makan dan minum rapat kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD di Kabupaten Polewali Mandar.

3. Pajak Hiburan

Penerimaan pajak hiburan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 dengan target sebesar **Rp. 110.000.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 35.253.500,-** atau **32 %** tingkat penerimaannya mengalami peningkatan kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai realisasi 62 %. Adapun tren penerimaan pajak hiburan dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Sebagaimana digambarkan pada grafik berikut ini

**Gambar 4 : Tren Penerimaan Pajak Hiburan 2016-2019**



Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2020

Penerimaan pajak hiburan pada tahun 2018 sebesar **Rp. 53.406.875,-** atau sebesar 100,36 % dan realisasi tahun 2019 sebesar **Rp. 104.006.564** atau sebesar 101.06 %. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar sebesar 35.253.500 % disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi turunnya penerimaan pajak hiburan, sedangkan pada tahun 2021 penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan cukup signifikan, karena faktor-faktor yang antara lain :

- a. Penurunan jumlah pengunjung pada obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Polewali Mandar menyebabkan terjadinya Penurunan yang cukup signifikan pada penerimaan pajak hiburan di Kecamatan Binuang dan Wonomulyo yang menjadi obyek wisata pengunjung baik

lokal maupun dari daerah lain.

- b. Tidak aktifnya sejumlah obyek pajak Hiburan seperti Rumah Bernyanyi dan Futsal yang mengakibatkan turunnya jumlah penerimaan Pajak Hiburan

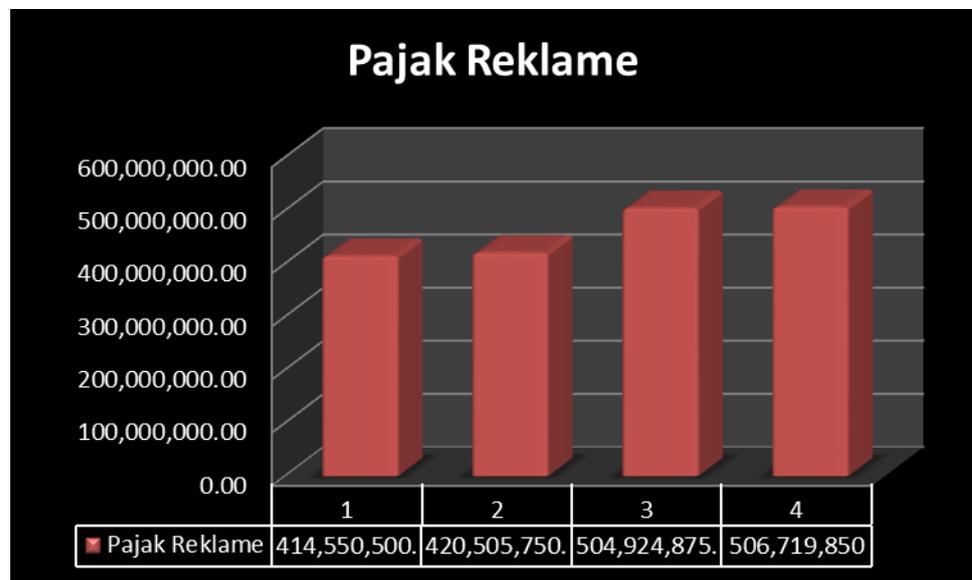
Kondisi pandemik Covid 19 yang masih melanda di Kabupaten Polewali Mandar sehingga beberapa obyek hiburan kekurangan pemasukan sehingga berdampak pada menurunnya realisasi penerimaan pajak hiburan.



4. Pajak Reklame

Penerimaan pajak reklame yang dikelola Badan Pendapatan tahun 2021 dari target Rp. 400.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 420.505.750,- atau sebesar 122 %. Adapun Tren penerimaan dari pajak reklame yang dikelola oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar terus mengalami peningkatan penerimaan pajak reklame dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Sebagaimana tergambar pada grafik berikut ini :

Gambar 5 : Tren Penerimaan Pajak Reklame 2018-2021



Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2021

Banyaknya iklan yang terpasang di Kabupaten Polewali Mandar sehingga terjadi peningkatan penerimaan dari pajak reklame sehingga pada tahun 2018 target yang ditetapkan untuk pajak reklame sebesar **Rp. 400.000.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 414.550.500,00** dan tahun berikutnya terjadi kenaikan penerimaan pajak reklame yang cukup signifikan pada tahun 2021 target penerimaan pajak reklame sebesar **Rp.450.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 506.719.850,-** atau mencapai **105 %**. Peningkatan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Polewali Mandar disebabkan beberapa faktor antara lain :

- a. Bertambahnya jumlah / unit reklame yang terpasang di Kabupaten Polewali Mandar sehingga mempengaruhi tingkat penerimaan pajak

reklame pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar

- b. Vendor (penyedia reklame) yang memasang reklame di Kabupaten Polewali Mandar semakin meningkat setiap tahunnya hal ini menyebabkan penerimaan pajak reklame semakin tinggi
- c. Persaingan antar brand komersil yang ada di Kabupaten Polewali Mandar menyebabkan makin banyaknya reklame yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Penambahan produk-produk yang diiklankan berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Polewali Mandar.



5. Pajak Penerangan Jalan

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 dari target 2021 sebesar **Rp. 11.000.0000,00** dan realisasi sebesar **Rp. 11.146.111.452,00** atau **101 %** bersumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kabupaten Polewali Mandar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagaimana tergambar dari grafik berikut ini :

Gambar 6 : Tren Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 2018-2021



Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2021

Peningkatan pemakaian listrik untuk masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar sehingga terjadi peningkatan penerimaan dari pajak penerangan jalan pada tahun 2018 target yang ditetapkan untuk pajak penerangan jalan sebesar **Rp. 10.000.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 10.382.309.471,00** kemudian pada tahun berikutnya peningkatan penerimaan cukup signifikan dari target yang telah ditetapkan pada tahun berikutnya terjadi kenaikan penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun 2021 target penerimaan pajak penerangan jalan sebesar **Rp.11.500.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 11.746.687.347,00**

atau mencapai **101.82 %**. Adapun hal menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) antara lain :

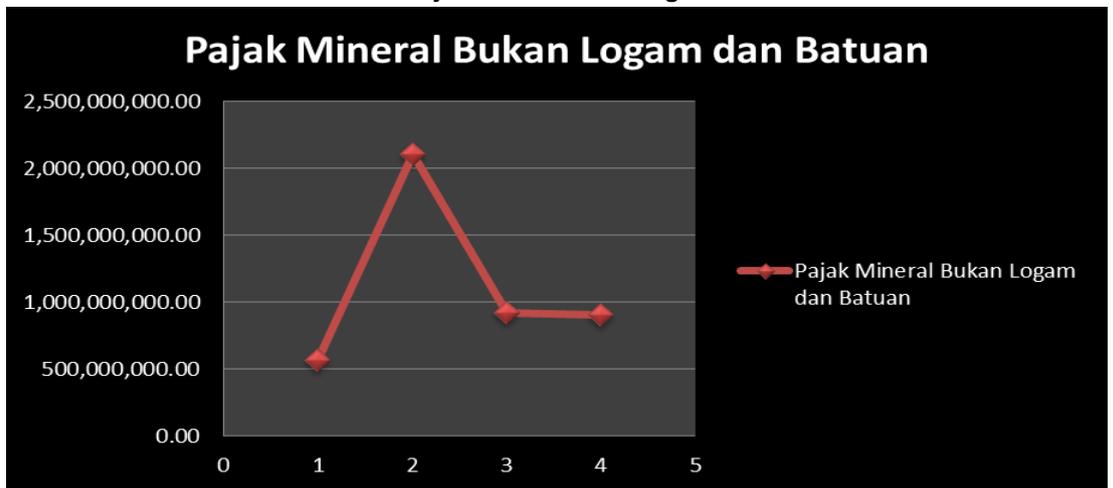
- a. Naiknya tarif dasar listrik (TDL) untuk pemakaian listrik rumah tangga dan industry sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Koordinasi dengan PLN cabang Sulawesi Barat dengan Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar berdampak pada peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Polewali Mandar.



6. Pajak Mineral bukan logam dan batuan

Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dikelola oleh Badan Pendapatan tahun 2021 dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 2.150.000.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 958.475.946,-** atau sebesar **44.58 %**. Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami peningkatan yang sangat signifikan di bandingkan realisasi tahun sebelumnya pada tahun 2018 sampai 2021. Tren Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan selama tahun 2018 s/d 2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 7 : Tren Penerimaan Pajak Mineral bukan logam dan batuan 2018-2021



Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2021

Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya sebesar **141 %**. namun mengalami penurunan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Refocusing Anggaran Pembangunan yang sebagian besar dialihkan ke anggaran untuk mengatasi pandemic covid 19 sehingga pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar berkurang
- b. Terhambatnya Pembangunan perumahan karena kondisi pandemic covid 19 menyebabkan kurangnya penerimaan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

## 7. Pajak Air Tanah

Penerimaan pajak air tanah yang dikelola Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 dari target **Rp. 30.000.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 36.525.600,-** atau sebesar **102 %** realisasi penerimaan Pajak Air Tanah pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan penerimaan pada tahun 2020. Adapun Tren penerimaan pajak air tanah dapat dilihat pada grafik berikut ini ::

Gambar 8 : Tren Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2018-2021



Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2021

Tren penerimaan pajak air tanah mengalami peningkatan realisasi yang cukup signifikan tahun 2019 penerimaan pajak air tanah mencapai pada tahun 2018 sebesar **Rp.26.605.000,00** atau lebih dari **100.61%** sedangkan pada tahun 2019 sebesar **Rp.30.647.200,00** atau **115%**. peningkatan penerimaan pajak air tanah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

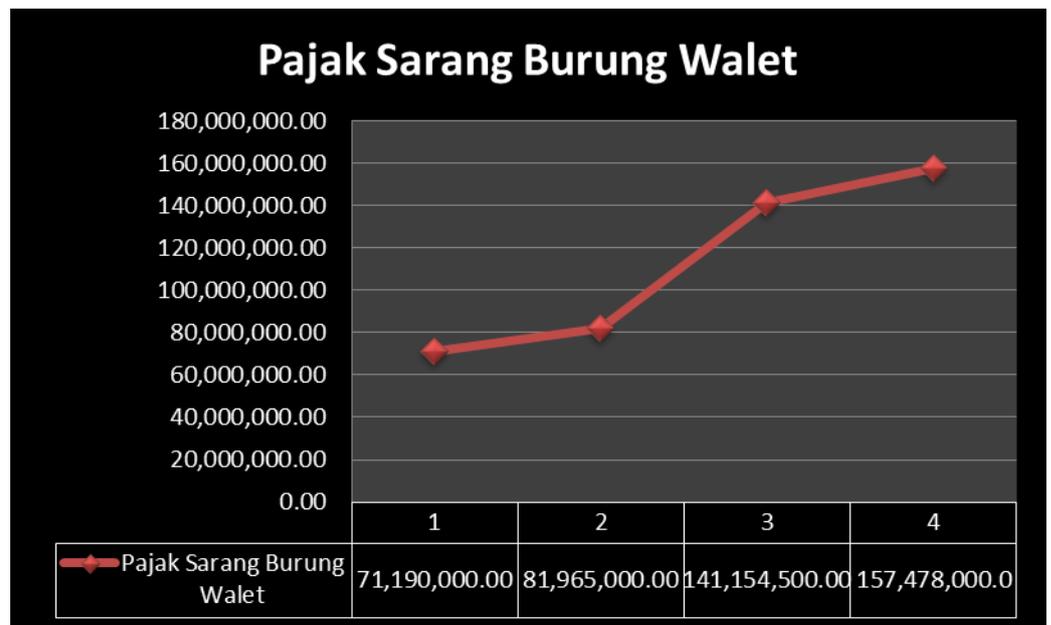
- Peningkatan jumlah obyek pajak air tanah di Kabupaten Polewali Mandar yang dari tahun ke tahun semakin meningkat menyebabkan penerimaan pajak air tanah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2019

- b. Koordinasi antara pihak terkait yang menggunakan air tanah kepada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar sehingga terjadi peningkatan penerimaan pajak air tanah di Kabupaten Polewali Mandar.

8. Pajak Sarang Burung Walet

Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet yang dikelola oleh Badan Pendapatan tahun 2021 dari target sebesar **Rp. 350.000.000,-** dan terealisasi **Rp. 157.478.000,-** atau sebesar **47 %** Tren peningkatan penerimaan pajak sarang burung wallet dari tahun 2019-2021 dapat di lihat pada grafik berikut ini :

Gambar 9 : Tren Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2018-2021



Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2020

Penerimaan pajak sarang burung walet setiap tahun mengalami pada tahun 2019 terealisasi sebesar **Rp. 81.965.000,-** dengan capaian sebesar **115 %** namun dari target penerimaan tahun 2021 mengalami penurunan penerimaan. Turunnya penerimaan pajak sarang burung walet disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Meningkatnya Jumlah Target Penerimaan yang tidak diimbangi dengan jumlah penerimaan sehingga masih jauh target penerimaan pajak

sarang burung wallet

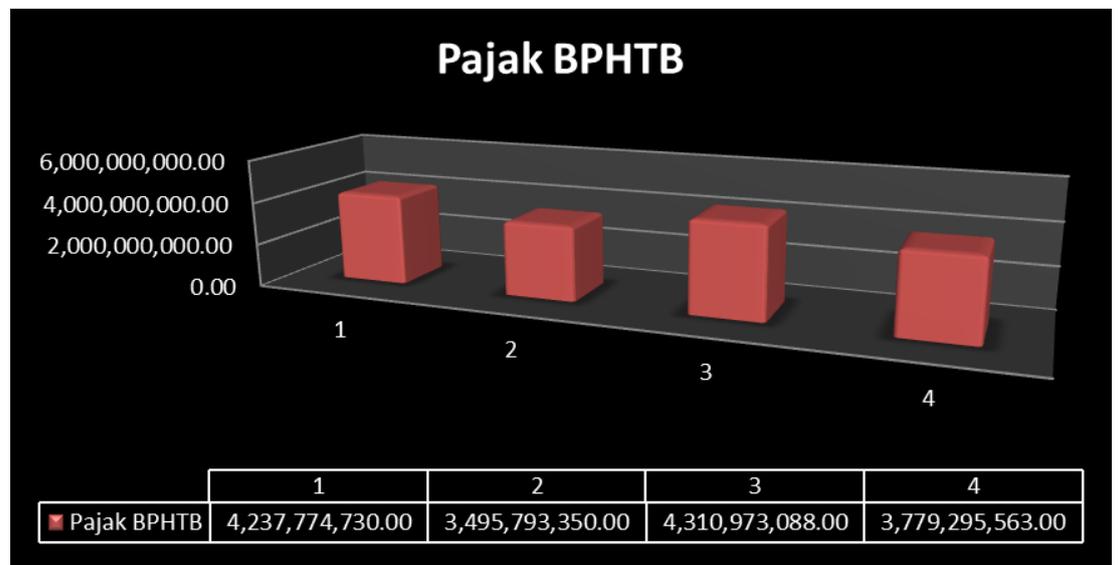
- b. Hasil panen wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Polewali Mandar yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya berdampak pada tingginya tingkat realisasi penerimaan wajib pajak sarang burung walet tahun 2021.



9. Pajak BPHTB

Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2021 dengan target sebesar **Rp. 4.100.000.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 3.779.295.563,-** atau sebesar **92 %**. Penerimaan pajak BPHTB pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan penerimaan pajak BPHTB pada tahun 2021. Tren penerimaan pajak BPHTB di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2018 s/d 2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 10 : Tren Penerimaan Pajak BPHTB Tahun 2018-2021



Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2021

- a. Capaian dari realisasi penerimaan pajak BPHTB mengalami pada tahun 2018 dengan penerimaan pajak BPHTB sebesar **Rp. 4.237.774.730,-** atau sebesar **141.26 %** namun pada tahun 2019 mengalami penurunan dari realisasi penerimaan sebesar 97 %. Peningkatan penerimaan pajak BPHTB sedangkan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan dengan capaian sebesar 92 % disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : Koordinasi antara Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar dan Pihak Notaris selaku PPAT dalam pengurusan sertifikat tanah terkait pajak BPHTB sangat

membantu tingkat penerimaan dari sektor pajak BPHTB di Kabupaten Polewali Mandar. Namun masih terkendala dalam penentuan akad kredit yang mensyaratkan adanya sertifikat layak fungsi (SLF) pada Kabupaten Polewali Mandar

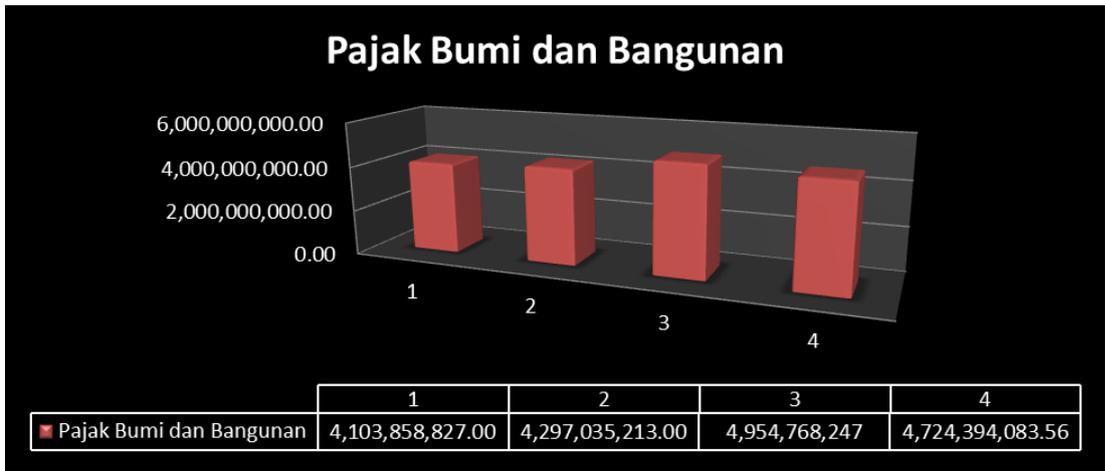
- b. Terdapat beberapa rekanan developer yang belum menyelesaikan pajak BPHTB karena menunggu terbitnya sertifikat layak fungsi (SLF) dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar.



10. Pajak PBB P2

Penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) pada tahun 2021 dari target sebesar **Rp. 5.200.000.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 4.724.394.083,-** atau sebesar **91 %**. Perlimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan daerah. Namun karena adanya beberapa tunggakan pajak menyebabkan penerimaan PBB P2 mengalami penurunan. Tren Penerimaan PBB P2 dari tahun 2018-2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 11 : Tren Penerimaan Pajak PBB P2 Tahun 2018-2021



Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2021

Realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2019 mengalami peningkatan di bandingkan tahun 2018 dari realisasi penerimaan sebesar **Rp. 4.131.406.452,-** sementara pada tahun 2019 dengan Realisasi penerimaan PBB P2 sebesar **Rp. 4.297.035.215** dengan capaian sebesar **97 %** dari target yang telah ditetapkan. Penurunan penerimaan PBB P2 disebabkan beberapa faktor antara lain :

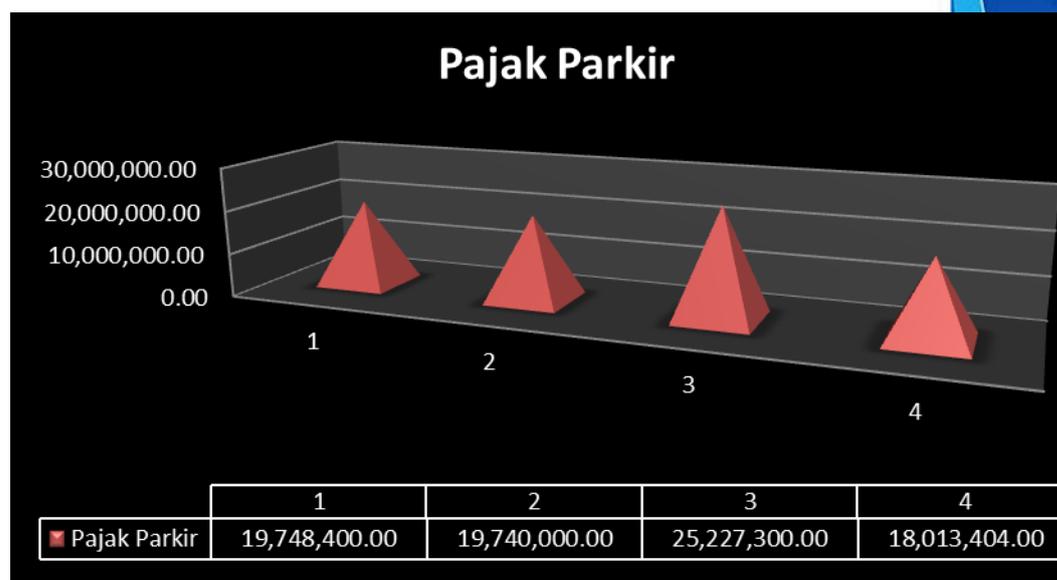
- a. Masih beberapa data NJOP yang belum terupdate sehingga masih menggunakan nilai lama sebagai NJOP pada tahun 2019.

- b. Tunggakan penerimaan pajak PBB P2 tahun lalu dan tahun berjalan menyebabkan kurangnya penerimaan pajak PBB P2.

## 11. Pajak Parkir

Penerimaan pajak parkir yang dikelola oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 dengan target sebesar **Rp. 20.000.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 20.143.000,-** atau sebesar **101 %** mulai dilaksanakan pada tahun 2016 hingga saat ini. Penerimaan pajak parkir bersumber dari kerjasama pihak ketiga yang menyediakan lokasi parkir dengan Pemerintah Daerah. Penerimaan Pajak Parkir dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 12 : Tren Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2018-2021



Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2021

Penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan setiap tahunnya dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar **Rp. 10.069.000,-** terjadi peningkatan cukup signifikan pada tahun 2019 dengan realisasi penerimaan sebesar **Rp. 19.740.000,-** . peningkatan penerimaan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Pertambahan jumlah kendaraan yang menggunakan jasa parkir pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Terdapat penambahan sejumlah lokasi parkir yang di sediakan oleh pemerintah
- c. Kesadaran wajib pajak parkir untuk membayar kewajiban kepada pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Keberhasilan atas Peningkatan penerimaan pajak daerah terjadi karena adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara wajib pajak dan petugas pelayanan pajak dengan penyampaian SPTPD Pajak Daerah. Begitupula dengan adanya dukungan para aparat untuk mengoptimalkan penagihan Pajak dan Penertiban Pajak.



Meskipun melampaui target dan indikator 1 tercapai yaitu dengan capaian 107 %, namun tetap terdapat kendala diantaranya :

1. Perubahan data obyek dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara bertahap menyebabkan terjadinya tunggakan pada Pajak Bumi dan Bangunan yang menyebabkan berkurangnya pencapaian realisasi pajak Bumi dan Bangunan.

Penerbitan sertifikat layak fungsi (SLF) yang cukup lama sehingga beberapa developer terlambat menyelesaikan pembayaran pajak BPHTB hal ini tentunya berdampak pada penerimaan Pajak BPHTB Kabupaten Polewali Mandar



**Solusi** menurunnya penerimaan pajak daerah dari sektor pajak BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan, maka langkah dilakukan oleh Badan Pendapatan antara lain :

1. Melakukan kegiatan penyusunan Zona Nilai Tanah (ZNT) untuk mengupdatee nilai NJOP PBB 2 yang selama kurang lebih 10 tahun belum pernah dilakukan review oleh Badan Pendapatan.
2. Melakukan kegiatan sosialisasi peraturan daerah mengenai pajak restoran dan pajak air tanah pada masyarakat atau wajib pajak.

3. Mengatasi kekurangan anggaran dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk menutupi kekurangan akibat penurunan intensitas penagihan.
4. Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penerbitan sertifikat layak fungsi bangunan (SLF) agar developer dapat melakukan akad kredit atas kegiatan pembangunan yang mereka lakukan yang tentunya ini akan berdampak pada peningkatnya penerimaan pajak BPHTB.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pada indikator kinerja organisasi. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini :

**Tabel 3.5 : Data Kegiatan Pendukung pada Indikator 1**

Kegiatan	Sub. Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	257,774,300
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	259,460,500
	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	96,099,800
	Penagihan Pajak Daerah	341,477,200
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	427,768,600
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	632,332,300
	Jumlah	2,014,912,700

Sumber: Badan Pendapatan, 2021

Untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran kegiatan yang diarahkan untuk mendukung kinerja sasaran strategis tersebut efektif dan efisien, maka perlu diukur tingkat efektifitas kegiatan dan efisiensi penggunaan sumberdaya/anggaran melalui pengukuran Kinerja Input dan Kinerja Output serta Tingkat efisiensi Kegiatan Kinerja input merupakan instrument untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tataran input kegiatan.

Kinerja input diukur dengan membandingkan antara jumlah anggaran dan realisasi anggaran. Kinerja input dapat menganalisis apakah kegiatan yang

terlaksana sesuai rencana. Sebagaimana dilihat pada tabel 3.6 berikut ini :

**Tabel 3.6 : Kinerja Input pada Indikator 1**

Kegiatan	Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	257,774,300	251,359,300	97.51	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	259,460,500	259,177,900	99.89	
	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	96,099,800	95,543,300	99.42	
	Penagihan Pajak Daerah	341,477,200	337,233,700	98.76	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	427,768,600	406,012,890	94.91	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	632,332,300	631,215,100	99.82	
	Jumlah		2,014,912,700	1,980,542,190	98.29

Sumber: Badan Pendapatan, 2020

Kinerja output merupakan instrument untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tataran output kegiatan.

Kinerja output diukur dengan membandingkan antara realisasi output kegiatan dengan target output kegiatan yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Kinerja output dapat menganalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai rencana.

Kinerja sasaran adalah jumlah rata-rata dari seluruh tingkat efisiensi program / kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Kinerja sasaran diukur dengan capaian sasaran strategis berdasarkan target kinerja dan penyerapan anggaran serta persentase capaian kinerja organisasi.

### 3.1.2 Sasaran Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah

Indikator Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah menjadi sasaran strategis Badan Pendapatan dikarenakan alasan teknis dan alasan kebijakan, alasan teknis terkait peran Badan Pendapatan sebagai Koordinator pengelolaan retribusi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai bidang retribusi yang dikelola, sedangkan alasan regulasi yang mengatur mengenai tarif retribusi yang dipungut pemerintah harus

menyesuaikan dengan pengukuran potensi retribusi pada masing-masing bidang retribusi daerah yang secara fungsi melekat pada Badan Pendapatan sebagai OPD pembuat kebijakan teknis.

Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya penerimaan retribusi daerah terdiri dari satu indikator yaitu persentase capaian target retribusi daerah dengan formulasi Realisasi Retribusi Daerah dibagi dengan Target Retribusi Daerah kemudian dikalikan 100, dengan formulasi dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Retribusi}}{\text{Target Retribusi}} \times 100$$



Gambaran tentang retribusi daerah yang dipungut antara lain bersumber dari organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan bidang retribusi masing-masing, sebagaimana terlihat pada tabel 3.7. berikut ini:

**Tabel 3.7 Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah Tahun 2021**

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	<b>DINAS KESEHATAN</b>	5.802.500.000,00	7.618.139.000,00	131,29
	Non Kapitasi	5.500.000.000,00	5.276.877.000,00	132,31
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.500.000,00	1.200.000,00	48,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Laboratorium	300.000.000,00	340.062.000,00	113,35
2	<b>DINAS PU DAN PENATAAN RUANG</b>	1.500.000.000,00	1.168.219.654,00	77,88
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	500.000.000,00	315.980.000,00	63,20
	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000,00	852.239.654,00	85,22
3	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	1.430.000.000,00	732.444.000,00	51,22
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	76.570.000,00	102,09
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000,00	19.896.000,00	66,32
	Retribusi Jasa Usaha Terminal	200.000.000,00	13.500.000,00	6,75
	a. TPR	180.000.000,00	11.500.000,00	6,39
	b. Sewa Ruang Terminal	20.000.000,00	2.000.000,00	5,20
	Retribusi tempat khusus parkir	1.100.000.000,00	620.000.000,00	56,38
	a. Parkir Khusus	0	189.400.000,00	0,00
	b. Parkir RSUD	0	430.828.000,00	0,00
	Retribusi Izin Trayek	25.000.000,00	2.250.000,00	9,00
4	<b>DINAS LING. HIDUP DAN KEHUTANAN</b>	625.000.000,00	407.955.000,00	65,27
	Retribusi Izin Gangguan ( HO )	425.000.000,00	207.000.000,00	48,71
	Retribusi Persampahan	200.000.000,00	209.955.000,00	100,48
5	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	75.000.000,00	80.200.000,00	106,93
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75.000.000,00	80.200.000,00	106,93
6	<b>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</b>	540.000.000,00	107.718.000,00	19,95
	Retribusi Rumah Potong Hewan	25.000.000,00	12.915.000,00	51,66
	Penjualan Hasil Peternakan / Semen Beku	175.000.000,00	28.655.000,00	16,37
	Penjualan Hasil pertanian	340.000.000,00	66.148.000,00	19,46
7	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	105.000.000,00	98.173.500,00	93,50
	Penjualan Hasil Perikanan/dokumenn lelang	105.000.000,00	98.173.500,00	93,50
8	<b>DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>	12.000.000,00	11.161.000,00	93,01
	Retribusi Tera / Teraulang	12.000.000,00	11.161.000,00	93,01
9	<b>DINAS KOMINFO STATISTIK &amp; PERSANDIAN</b>	245.000.000,00	149.598.400,00	61,06
	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	245.000.000,00	149.598.400,00	61,06

10	<b>KECAMATAN POLEWALI</b>	515,000,000.00	516,305,000.00	100.25
	Retribusi Pelayanan Pasar	515,000,000.00	512,630,000.00	101.54
	a. Pasar sentral Pekkabata	330,000,000.00	333,640,000.00	101.10
	b. Pasar baru Polewali	185,000,000.00	182,665,000.00	98.74
11	<b>KECAMATAN WONOMULYO</b>	890,000,000.00	964.387.000,00	108.36
	Retribusi Pelayanan Pasar	690.000.000,00	686.499.000,00	99.49
	a. Pasar Induk Wono / Grosir	330.000.000,00	312.957.000,00	94.84
	b. Pasar Ikan Wono / Ternak	360.000.000,00	373.542.000,00	103.76
	Retribusi Pelayanan Persampahan	200.000.000,00	277.988.000,00	138,94
12	<b>KECAMATAN CAMPALAGIAN</b>	145,000,000.00	145.000.000,00	100,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	145,000,000.00	145,000,000.00	100,00
13	<b>KECAMATAN TINAMBUNG</b>	175,000,000.00	125.840.000,00	71.91
	Retribusi Pelayanan Pasar	175,000,000.00	125.840.000,00	71.91
14	<b>KECAMATAN TAPANGO</b>	25,000,000.00	25.000.000,00	100,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	25,000,000.00	25,000,000.00	100,00
15	<b>KECAMATAN LUYO</b>	40,000,000.00	40,600,000.00	101.50
	Retribusi Pelayanan Pasar	40,000,000.00	40,600,000.00	101.50
16	<b>KECAMATAN ALU</b>	22,500,000.00	15,000,000.00	66.67
	Retribusi Pasar Petoosang	22,500,000.00	15,000,000.00	66.67
17	<b>KECAMATAN BALANIPA</b>	35,000,000.00	35,000,000.00	100,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	35,000,000.00	35,000,000.00	100,00

Sumber: Badan Pendapatan, 2021

Penerimaan retribusi daerah sebagaimana di gambarkan pada tabel 3.9. dipengaruhi oleh realisasi penerimaan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait penerimaan retribusi. Dari data diatas dapat digambarkan tingkat penerimaan retribusi dari target dan realisasi penerimaan sebagaimana pada grafik berikut ini :

**Gambar 13 : Grafik Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2021**



Sumber: Badan Pendapatan, 2021

Dari table 3.7 dan Gambar 2 di atas, terlihat bahwa terdapat beberapa OPD yang mencapai target yang ditetapkan, diantaranya Dinas Kesehatan dengan realisasi sebesar 131,29 %, Sekretariat dengan realisasi sebesar 106%, Begitupula terdapat Kecamatan Wonomulyo dengan realisasi 108,36 % namun ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang realisasinya di bawah dari 50 % yaitu Dinas Pertanian dan Pangan dengan realisasi hanya sebesar 19,95 % dan Dinas Kominfo dan SP yang realisasinya menurun realisasi hanya sebesar 61.06 % sedangkan pada tahun 2018 mencapai 100 % lebih.

Dari perbandingan capaian tahun 2020 dengan capaian kinerja pada tahun 2019, dapat terlihat pada tabel 3.8 berikut :

**Tabel 3.8 Peningkatan Retribusi Daerah Tahun 2021**

NO	URAIAN	$\sum Rd\ n - 1$ ( Tahun 2021 )	$\sum Rd$ ( Tahun 2020)	$\sum Rd - \sum Rd - 1$	$\frac{\sum Rd - Rd\ n-1}{\sum Rd\ n - 1} \times 100$
	Retribusi Daerah	18.057.347.431	11.698.411.803.	6.348.945.628	154,27 %

Sumber: Badan Pendapatan, 2021

Dari tabel 3.8 diatas, terlihat bahwa capaian kinerja pada indikator persentase capaian target retribusi daerah tahun 2019 sebesar 100,48 % jika dibandingkan dengan persentase capaian retribusi daerah tahun 2019 terjadi peningkatan penerimaan retribusi daerah sebesar 98.88%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penerimaan retribusi daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Walaupun dengan realisasi yang mencapai target yang diharapkan, peningkatan persentase dari realisasi ditahun 2019 juga merupakan salah satu bukti keberhasilan sebagai OPD yang mengkoordinasikan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Keberhasilan tersebut disebabkan adanya peningkatan kualitas kerjasama dan koolaborasi antara stakeholders pengelola retribusi sehingga terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya (2017). Begitu pula hal ini juga didukung upaya aktif dari aparat untuk Badan Pendapatan yang setiap bulannya aktif melakukan rekonsiliasi pendapatan dan setiap triwulannya melakukan evaluasi terhadap semua komponen pengelola pendapatan, termasuk retribusi yang dikelola oleh OPD.

Dalam target pendapatan asli daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014-2019, realisasi capaian pada indikator kinerja penerimaan retribusi daerah tahun 2021 adalah sebesar **100.48 %** yaitu dengan realisasi **Rp. 15.000.000.000,00** dari target **Rp. 18.057.347.431,00** sehingga capaian kinerja pada indikator ini masuk dalam kriteria penilaian **SANGAT BAIK**

Permasalahan penerimaan retribusi yang belum mencapai target kinerja oleh karena kendala diantaranya :

1. Peningkatan penerimaan retribusi daerah pada Kabupaten Polewali Mandar disebabkan ada beberapa jenis penerimaan retribusi mengalami penurunan realisasi penerimaan yakni dari penerimaan retribusi dari Dinas Pertanian dan Pangan pada retribusi penjualan hasil pertanian dari target **Rp.540.000.000,-** dan terealisasi **Rp. 107.718.000,-** dengan capaian sebesar **19,95%**.
2. Perlimpahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Kementerian Perhubungan mengenai retribusi jasa usaha terminal berpengaruh pada pencapaian target seperti halnya pada Dinas Perhubungan dengan target sebesar **Rp. 200.000.000,-** namun yang terealisasi **Rp. 13.500.000,-** dengan capaian sebesar **6,75 %**.
3. Koordinasi dengan OPD pengelolaan retribusi dengan wajib retribusi daerah yang masih kurang efektif karena masih tingginya ego sektoral sehingga menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Polewali Mandar.

**Solusi** atas beberapa permasalahan di atas yang ditempuh oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar untuk mengantisipasi segala potensi hambatan dan tantangan tersebut, sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan monitoring pengelolaan atas realisasi retribusi daerah untuk mengevaluasi tingkat kedisiplinan aparat pelaksana dan komitmen pimpinan OPD untuk mempercepat penerimaan retribusi sesuai dengan target
2. Melakukan kegiatan penyediaan kertas berharga / barang kuasi sebagai alat pungut retribusi daerah dan juga sebagai pengendalian penerimaan retribusi daerah sehingga dapat diketahui potensi penerimaan dari retribusi daerah.

Data kegiatan pendukung merupakan kegiatan yang mendukung pencapaian

sasaran pada indikator kinerja badan pendapatan.

Untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran kegiatan yang diarahkan untuk mendukung kinerja sasaran strategis tersebut efektif dan efisien, perlu diukur tingkat efektifitas kegiatan dan efisiensi penggunaan sumberdaya/anggaran melalui pengukuran Kinerja Input dan Kinerja Output serta Tingkat efisiensi Kegiatan.

Kinerja input merupakan instrument untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tataran input kegiatan.

Kinerja input diukur dengan membandingkan antara jumlah anggaran dan realisasi anggaran. Kinerja input dapat menganalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai rencana.

Kinerja output merupakan instrument untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tataran output kegiatan.

Kinerja output diukur dengan membandingkan antara target indikator kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan. Kinerja output dapat menganalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai rencana.

Kinerja sasaran merupakan tingkat target kinerja yang dinyatakan sebagai tujuan nyata yang terukur serta tujuan yang dinyatakan sebagai standar nilai pencapaian kinerja organisasi.

Kinerja sasaran diukur dengan capaian sasaran strategis berdasarkan target kinerja dan penyerapan anggaran serta persentase capaian kinerja organisasi.

### **3.1.3 Sasaran meningkatnya tertib administrasi pendapatan daerah**

Sasaran meningkatnya tertib administrasi pendapatan daerah difokuskan pada penerimaan pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan yang terdiri dari dokumen administrasi pendapatan asli daerah. Dengan menghitung antara jumlah berkas administrasi yang

dibutuhkan dengan jumlah data yang mampu disediakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.

Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya tertib administrasi pendapatan daerah terdiri dari dua indikator yaitu persentase capaian tertib administrasi pembukuan pajak dan retribusi daerah dan jumlah paket dokumen potensi pendapatan daerah dengan formulasi perhitungan jumlah realisasi retribusi daerah dibagi total target retribusi daerah tahun 2018 dikalikan seratus persen.

$$TA : \frac{\text{Jumlah Data yang disediakan}}{\text{Jumlah Data yang dibutuhkan}} \times 100 \%$$

Ket :

TA : Tertib Administrasi

Adapun data yang dibutuhkan berupa :

1. Data laporan bulanan realisasi pendapatan asli daerah
2. Data hasil rekonsiliasi bulanan pendapatan daerah
3. Data pengelolaan piutang pajak daerah
4. Data potensi pendapatan asli daerah

Dari data yang dibutuhkan oleh Badan Pendapatan dengan data yang disediakan oleh dapat dilihat tingkat capaian sebagai berikut :

$$TA = \frac{4}{4} \times 100 \% = 100 \%$$

Untuk indikator jumlah paket dokumen data potensi pendapatan daerah dapat dilihat pada laporan bulanan pendapatan asli daerah, sebagai berikut :

**Tabel 3.9 Dokumen Data Potensi Pendapatan Daerah**

No	Jenis Data	Jumlah	Ket
1	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Januari	1	Paket
2	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Februari	1	Paket
3	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Maret	1	Paket
4	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan April	1	Paket
5	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Mei	1	Paket

6	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Juni	1	Paket
7	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Juli	1	Paket
8	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Agustus	1	Paket
9	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan September	1	Paket
10	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Oktober	1	Paket
11	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Nopember	1	Paket
12	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Desember	1	Paket
13	Laporan Pendapatan Daerah Tahunan	1	Paket
	<b>J U M L A H</b>	13	Paket

Sumber: Badan Pendapatan, 2018

Dari paket dokumen yang dibutuhkan oleh Badan Pendapatan dengan paket dokumen yang disediakan dapat dilihat tingkat capaian sebagai berikut :

$$TA = \frac{13}{13} \times 100 \% = 100 \%$$

Peningkatan tertib administrasi pendapatan daerah dapat diukur dengan persentase tertib administrasi pembukuan pajak dan retribusi daerah dan jumlah paket dokumen data potensi pembukuan dan pelaporan.

Dalam penyusunan proyeksi pendapatan daerah diperlukan adanya data yang lengkap yang mendukung Badan Pendapatan dalam menyusun proyeksi pendapatan daerah 2014-2019 perlu melihat trend pendapatan daerah hal ini tentunya dari data penerimaan pajak dan retribusi daerah setiap tahunnya yang menjadi acuan Badan Pendapatan dalam menyusun Proyeksi Pendapatan Daerah.

Dari data potensi pendapatan daerah yang dibutuhkan dan disediakan oleh Badan Pendapatan adalah sebesar 100 % dari semua potensi data yang dibutuhkan sudah dimiliki oleh Badan Pendapatan dari capaian kinerja ini dapat dimasukkan dalam kriteria **SANGAT BAIK**.

Permasalahan dalam tertib administrasi pendapatan daerah dalam kinerjanya karena kendala diantaranya :

1. Masih terdapat beberapa komponen data yang terkadang mengalami selisih dalam jumlah dalam pelaksanaan rekonsiliasi.

2. Pemahaman aparatur pengelola Pendapatan Asli Daerah mengenai tertib administrasi pendapatan daerah masih perlu pembinaan dalam pembukuan pajak dan retribusi daerah.

**Solusi** untuk meningkatkan tertib administrasi pendapatan daerah, maka langkah-langkah yang ditempuh oleh Badan Pendapatan sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai implelementasi Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi.
2. Melakukan kegiatan rekonsiliasi pelaporan pendapatan daerah untuk koordinasi pendapatan antara OPD pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat diketahui tingkat realisasi hingga hambatan dan kendala tercapainya target Pendapatan Asli Daerah

Data kegiatan pendukung merupakan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pada indikator kinerja badan pendapatan.

Untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran kegiatan yang diarahkan untuk mendukung kinerja sasaran strategis tersebut efektif dan efisien, perlu diukur tingkat efektifitas kegiatan dan efisiensi penggunaan sumberdaya/anggaran melalui pengukuran Kinerja Input dan Kinerja Output serta Tingkat efisiensi Kegiatan

Kinerja input merupakan instrument untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tataran input kegiatan.

Kinerja input diukur dengan membandingkan antara jumlah anggaran dan realisasi anggaran. Kinerja input dapat menganalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai rencana.

Kinerja output merupakan instrument untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tataran ouput kegiatan.

Kinerja output diukur dengan membandingkan antara target indikator kegiatan

dengan pelaksanaan kegiatan. Kinerja output dapat menganalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai rencana.

Kinerja sasaran merupakan tingkat target kinerja yang dinyatakan sebagai tujuan nyata yang terukur serta tujuan yang dinyatakan sebagai standar nilai pencapaian kinerja organisasi.

Dari 3 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja Badan Pendapatan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dalam kriteria **SANGAT BAIK** dengan rata-rata persentase capaian 100 % dan penyerapan anggaran mencapai rata-rata 90.39 % dan dapat dikategorikan **EFESIEN**.

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Lainnya

Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar tidak memiliki indikator kinerja lainnya (SPM dan MDGs)

### 3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 85.43 % dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan utama sebesar 57,93 % sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 43,07 % jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program / kegiatan untuk mendukung sasaran peningkatan Penerimaan Pajak Daerah sebesar 90,25 % dan sasaran peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah sebesar 99,35 % serta sasaran meningkatnya tertib administrasi pendapatan daerah sebesar 95.74 %

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program / kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.10 berikut ini :

**Tabel 3.10. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021**

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,252,600	8,252,600	100.00
		18,996,700	18,996,700	100.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,382,689,805	4,802,766,087	89.23
		13,401,000	13,401,000	100.00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19,560,000	19,560,000	100.00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5,109,000	5,085,000	99.53
		17,210,000	17,205,000	99.97
		187,280,800	187,130,800	99.92
		1,320,000	1,260,000	95.45
		48,856,400	48,856,400	100.00
		119,460,200	101,569,528	85.02
		11,685,000	7,465,000	63.89
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60,103,200	55,598,419	92.50
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	26,395,000	22,392,000	84.83
		3,600,000	600,000	16.67
		26,064,000	25,914,000	99.42
7	Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan	99,393,400	77,462,238	77.93
		13,400,000	11,802,000	88.07
8	Pengelolaan Pendapatan Daerah	257,774,300	251,359,300	97.51
		259,460,500	259,177,900	99.89
		96,099,800	95,543,300	99.42
		341,477,200	337,233,700	98.76
		427,768,600	406,012,890	94.91
		632,332,300	631,215,100	99.82
		8,077,689,805	7,405,858,962	91.68

Sumber: Badan Pendapatan, 2021

Adapun realisasi anggaran jika dilihat dari penetapan dokumen perjanjian kinerja tahun 2021 per sasaran kegiatan dan indikator kinerja Badan Pendapatan

sebagai berikut :

**Tabel 3.11: Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2021**

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran			Ket
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya Penerima Pajak Daerah	100 %	107 %	107 %	Rp.1.132.484.500	Rp.1.022.029.502	90.25 %	10 Kegiatan
2	Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah	100 %	100.48 %	100.48 %	Rp. 434.659.000	Rp. 431.838.582	99.35 %	2 Kegiatan
3	Meningkatnya tertib Administrasi Pendapatan Daerah	100 %	100 %	100 %	Rp. 53.540.500	Rp. 48.386.000	90.38 %	1 kegiatan
		13	13	13				

Sumber: Badan Pendapatan, 2021

### 3.4. Analisis Efisiensi

Perincian analisis efisiensi per sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.12 : Capaian Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ( $\geq 100\%$ )	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penerima Pajak Daerah	Persentase capaian target pajak daerah	103.97	90.25	90.25
2	Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah	Persentase capaian target retribusi daerah	100.48	99.35	99.79
3	Meningkatnya tertib Administrasi Pendapatan Daerah	Persentase tertib administrasi pembukuan pajak dan retribusi daerah	100	100	100
		Jumlah paket dokumen data potensi pendapatan daerah	13	13	100
<b>J U M L A H</b>					94.93

Sumber: Badan Pendapatan, 2021

Dari Tabel 3.12 di atas, terlihat bahwa tingkat efisiensi dari penggunaan sumberdaya untuk mencapai target sasaran strategis Badan Pendapatan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **94.93**. Hal ini dikategorikan **EFISIEN**.



# BAB IV

# PENUTUP



**BAPEN**

**BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

## BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di OPD Badan Pendapatan pada Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun tahun ke 3 dari rencana strategis OPD Badan Pendapatan Tahun 2019-2024. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum dicapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

### 4.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja OPD Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 3 (tiga) sasaran, terdapat 4 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2021, dari 4 indikator ada 3 indikator yang mencapai target yang ditetapkan sebesar **100 %** dan 1 indikator yang mencapai persentase sebesar **118 %**
2. Tantangan, hambatan dan kesulitan yang dihadapi untuk dapat mencapai target kinerja utama antara lain :
  - a. Terkait dengan realisasi retribusi daerah yang dikoordinir oleh Badan Pendapatan ada beberapa capaiannya dari retribusi yang dikelola oleh OPD teknis yang realisasinya mengalami peningkatan yang cukup signifikan di banding tahun lalu.
  - b. Sistem aplikasi Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD) yang masih perlu pembenahan untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Daerah untuk dapat lebih menggali potensi pendapatan asli daerah.

#### 4.2.Saran

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mempertahankan ketercapaian indikator kinerja dapat dirumuskan saran-saran/Rencana Aksi Sebagai Berikut:

- a. Meningkatkan PAD agar pertumbuhannya lebih besar dibandingkan pertumbuhan dana transfer sehingga kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah lebih besar dengan cara:
  1. Perbaiki kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah.
  2. Menggali potensi PAD dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan.
  3. Menggali potensi retribusi
- b. Menyusun akuntabilitas dengan lebih meningkatkan kualitas tertib administrasi pengelolaan pendapatan daerah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan ini disusun dan disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut pada tingkat atasan. Apabila dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Semoga Laporan ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan bernilai bagi upaya membangun kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar.

# LAKIP 2021